



Demokrasi di Indonesia sulit diprediksi
Ari Pradhanawati

Memastikan berpartisipasi dalam pemilu
adalah pilihan cerdas

Fitriyah



Buku ini menghadirkan perspektif baru tentang
partisipasi mahasiswa dalam pilkada, yang melampaui
partisipasi semu sebagaimana yang dipandang oleh
banyak pengamat selama ini. Mahasiswa ternyata aktif
dan langsung terlibat dalam pilkada dan selalu berusaha
memperoleh informasi melalui media sosial
Gregorius Sahdan



Pilihan Pemuda, masa depan Indonesia
Mustofa Agung Sardjono



Ari Pradhanawati - Fitriyah
Gregorius Sahdan - Mustofa Agung Sardjono

PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PILKADA SERENTAK 2020



ISBN 978-623-6226-67-4



9 786236 226674 >



PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PILKADA SERENTAK 2020

Penulis:
Ari Pradhanawati
Fitriyah
Gregorius Sahdan
Mustofa Agung Sardjono



Distributor buku, Penerbit & Percetakan
THE BEST SOLUTION

PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PILKADA 2020

Penulis: Ari Pradhanawati
Fitriyah
Gregorius Sahdan
Mustofa Agung Sardjono

Penyuting: Hartmantyo Pradigto Utomo

15,5 x 23,5 cm; iv + 52 halaman

Cetakan pertama, Juni 2022

ISBN: 978-623-6226-67-4

Desain Sampul: Suhaimi

Tata Letak: Sufi

Diterbitkan oleh:

CV. Istana Agency

(Anggota IKAPI DIY)

Jln.Nyi Adi Sari Gg.Dahlia 1 Pilahan KG1/722
Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Sejak dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung 2005 sebagai perwujudan dari demokratisasi, ada kesimpulan sementara bahwa partisipasi masyarakat akan mengalami peningkatan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa ruang partisipasi yang dibuka secara luas bagi pemilih sebagai wujud kedaulatan akan dimanfaatkan guna penyampaian aspirasinya. Pilkada tidak lagi terfokus pada kepentingan politik suatu kelompok, tetapi mampu mengekspresikan multi pertimbangan dalam pemilihan pimpinan “yang dikehendaki” setiap warga negara, tidak terkecuali segmen mahasiswa.

Pembahasan lebih dalam terkait dengan partisipasi mahasiswa dipertimbangkan oleh para penulis menjadi penting, bukan saja disebabkan mahasiswa merupakan kelompok masyarakat terdidik tertinggi, tetapi juga sebagian besar diharapkan akan memegang tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Meskipun demikian juga disadari

oleh para penulis, bahwa secara kuantitatif memang jumlah pemilih mahasiswa relatif kecil, di mana secara rata-rata dalam setiap pemilihan kurang dari 10% dari total warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Akan tetapi secara kualitatif antara lain dari tinjauan kesadaran politiknya juga menjadi tolok ukur dalam rangka mengetahui kualitas Pilkada itu sendiri.

Di samping itu ada bagian khusus yang juga menjadi pertimbangan penting penulis untuk mengambil tema mahasiswa dalam buku ini, bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan di masa depan, maka tidak terbantahkan bahwa peran teknologi informasi termasuk dalam kaitannya dengan Pilkada juga dapat mempengaruhi kualitas pesta demokrasi tersebut. Dalam faktanya kelompok muda (atau seringkali disebut saat ini sebagai generasi millennial) termasuk mahasiswa di dalamnya adalah pengakses dan pengguna teknologi informasi dalam jumlah terbesar atau teraktif di Indonesia, bahkan di dunia.

Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, terutama beberapa universitas yang telah memberikan partisipasinya melalui proses *rapid appraisal* guna penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini. Tentu saja sangat disadari penulis, dengan segala keterbatasan yang senantiasa mengiringi setiap upaya, termasuk dalam penyusunan buku ini, membuat

masih ada saja kekurang-lengkapan di sana sini.

Semoga buku ringkas ini dapat memberi banyak manfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Terimakasih.

Semarang, 1 Mei 2022

Ari Pradhanawati

Fitriyah

Gregorius Sahdan

Mustofa Agung Sardjono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DINAMIKA PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	1
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PILKADA.....	6
PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PILKADA SERENTAK 2020	12
Demografi Peserta Pilkada di Indonesia.....	12
Karakteristik Mahasiswa Terkait dengan Pilkada	16
Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada	19
Sumber Informasi Pilkada	22
Pendapat Mahasiswa Terkait dengan Pilkada 2020 ...	26
Peran KPU dan Bawaslu dalam Pilkada	32
Politik Uang dan Kecurangan Dalam Pilkada.....	35
Masalah Utama Dalam Pilkada	36
KESIMPULAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
GLOSSARIUM.....	41
DAFTAR SINGKATAN.....	44
TENTANG PENULIS	45



DINAMIKA PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA

Menutup akhir 2020 dinamika politik di Indonesia semakin memuncak terdapat sekitar 270 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pemungutan suara yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020, di tengah Covid-19 menimbulkan pesimisme terhadap partisipasi pemilih, terutama partisipasi mahasiswa. Sejauh ini memang belum pernah terjadi penurunan yang besar terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Indonesia.

Dalam Pemilu 2019, tercatat partisipasi pemilih mencapai 81%, meningkat dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 yang hanya mencapai 70%.¹ Dalam Pilkada Serentak 2017, partisipasi pemilih secara nasional mencapai 74%.² Penelitian sebelumnya sudah

¹ Baca; <http://kpud-sukoharjokab.go.id/berita/detail/catatan-di-balik-meningkatnya-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-2019>, diakses tanggal 14 September 2021.

² Baca Kumparan; "Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak Mencapai 74%", Kumparan, 23 Februari 2019.

dilakukan kepada pemilih muda dalam pemilu dan pilkada, yang hasilnya menunjukkan bahwa pemilih muda cenderung skeptis terhadap politik, pemilu maupun calon, walaupun pemilih muda bukan warga negara yang pesimis.³

Belum ada penelitian yang secara khusus menggambarkan tentang tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu dan pilkada. Namun berdasarkan data partisipasi dalam pemilu dan pilkada di Indonesia sejak pemilu 2004, tidak mengalami krisis partisipasi pemilih yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu 2004, angka partisipasi pemilih mencapai 84,07% dan yang tidak memilih (golput) mencapai 15,93%. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70,96% dan jumlah golput mencapai 29,04%.⁴

Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Orde Baru yang mencapai rata-rata 92%, jelas memang Pemilu Pasca Orde Baru mengalami penurunan partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah restriksi politik yang kuat pada Orde Baru melalui aparaturnegara terutama militer, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk tidak memilih.

Dengan kata lain, faktor penggerak partisipasi pemilih

³Baca Fitriyah, Laila Kholid Alfidrus, & Dzunuwanus Ghulam Manar, Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1), 2021, doi: 10.14710/politika.12.1.2021.

⁴Lihat Fitriyah, *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021, Halaman 135-136.

di dalam rezim otoritarian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim politik untuk memaksa warga negara agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yang sebagian besar suara diberikan kepada Golkar sebagai *government party*. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu-pemilu yang terjadi pasca Orde Baru, di mana faktor penggerak partisipasi politik adalah kesadaran politik warga negara, bukan karena mobilisasi negara dengan menggunakan alat kekerasan.⁵

Studi dan kajian yang dilakukan oleh Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin dalam buku "Evaluasi Kristis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia" (2009) menyoroti beberapa faktor elementer yang berperan besar dalam menggerakkan partisipasi pemilih dalam pilkada antara lain; (1) sistem pilkada yang digunakan telah mengalami pergeseran dari sistem dua ronde atau *two round system* ke suara mayoritas (asal memperoleh suara lebih) dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada; (2) sikap pragmatisme partai politik yang berusaha memperoleh kemenangan dengan berbagai cara, sehingga kerap terjadi mobilisasi pemilih dalam pilkada; (3) tata kelola pilkada yang buruk memberikan peluang terjadinya mobilisasi pemilih siluman; (4) pengawasan pilkada oleh Panwaslu yang kurang efektif dan kurang menjamin pembatasan pemilih siluman; (5) munculnya fenomena orang kuat yang memiliki kemampuan mengorganisir seluruh sumberdaya politik dan ekonomi yang

⁵Bagian ini bisa membaca: Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto-Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.



dapat digunakan untuk menarik perhatian pemilih.⁶

Dengan demikian, partisipasi pemilih memang tidak selalu kongruen dengan kesadaran pemilih dalam pilkada, tetapi bisa digerakkan oleh berbagai faktor seperti yang telah disebutkan di atas. Ari Pradhanawati (2021) dalam buku; "Pilkada Orang Kuat" menguraikan tentang "jebakan formalisme" demokrasi yang bisa jadi berkontribusi dalam pembangunan demokrasi, terutama dalam menggerakkan partisipasi pemilih. Pradhanawati menggambarkan bahwa jebakan formalisme demokrasi membuat kita sangat sibuk meletakkan pilkada sebagai sekedar "pesta" untuk mendapatkan legitimasi, dan kita lupa esensi fundamental dari pembangunan demokrasi itu sebagai proses deliberasi hak politik, partisipasi pemilih dan kebebasan sipil dalam pilkada dan pemilu.

Hal ini menyebabkan pilkada dan pemilu kita hanya ramai dengan kata-kata manis para politisi dalam kampanye dan kurang menggaungkan suara warga sebagai suara kedaulatan. Suara warga harusnya lebih mendapat tempat dibandingkan dengan kata-kata manis para politisi.⁷

Kajian yang dilakukan oleh Gregorius Sahdan dan Besar Tirto Husodo (2021) menunjukkan keterkaitan antara partisipasi pemilih dalam pilkada dengan transformasi orang kuat. Menurut Sahdan Husodo, transformasi orang kuat

⁶Baca bagian ini dalam buku; "Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia" dengan editor Gregorius Sahdan dan Muhtar Habbodin, IPD, 2009, halaman v-vii.

⁷Baca Ari Pradhanawati dalam kata pengantar buku: "Pilkada Orang Kuat", IPD 2021 halaman xii.

dalam pilkada ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain; (1) solidaritas partai pendukung terhadap kandidasi orang kuat yang berimplikasi kepada mobilisasi pendukungnya; (2) keterlibatan organisasi-organisasi informal yang memiliki jaringan dan koneksi dengan orang kuat; (3) penggunaan jaringan organisasi formal yang memiliki daya ungkit untuk memobilisasi pemilih.⁸

Buku yang anda baca ini menyajikan data kuantitatif terkait dengan partisipasi politik mahasiswa yang diambil sebagai cuplikan untuk menggambarkan bahwa masih ada pemilih yang memiliki partisipasi yang dibentuk berdasarkan kesadaran politik dalam pilkada dan mereka adalah mahasiswa yang berusaha terlibat dan mengakses berbagai informasi dalam pilkada, sekalipun pilkada kita ditandai oleh berbagai isu seperti pembangunan demokrasi yang lemah, *money politics*, partisipasi pemilih yang rendah, arena pilkada yang dikuasai orang kuat dan menguatnya politik dinasti.

⁸Baca Gregorius Sahdan dan Besar Tirta Husodo "Transformasi Orang Kuat Dalam Pilkada Serentak 2020" dalam buku Pilkada Orang Kuat, ibid, halaman 1-24.





PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PILKADA

Kajian Archon Fung dan Erik Olin Wright (2001; 2003), menempatkan partisipasi politik sebagai bagian dari *deepening democracy*. Fung dan Wright memetakan komponen penting dari partisipasi politik sebagai bagian dari *deepening democracy* antara lain adalah, (1) partisipasi dalam menjalankan fungsi spesifik Dewan Rumah Tangga di Chicago USA; (2) partisipasi dalam perencanaan konservasi pemerintah daerah di AS; (3) partisipasi dalam perencanaan anggaran kota di Porto Alegre Brazil; (4) partisipasi dalam desentralisasi demokratis di Bengal Barat dan Kerala India.⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan bagian dari *developing democracy* atau pembangunan demokrasi, yang mana partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan sukarela warga

⁹Baca Archon Fung & Erik Olin Wright, *Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance*. *Politics & Society*, 29(1), 5-41. 2001, doi:10.1177/0032329201029001002, atau Archon Fung & Erik Olin Wright, *Deepening Democracy*, Verso, UK, 2003

negara untuk memengaruhi pengambilan kebijakan.¹⁰

Gary Marks dan Larry Diamond (1992:6) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara partisipasi politik sebagai bagian dari pembangunan demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Hubungan antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Demokrasi di suatu negara¹¹. Dengan kata lain, Marks dan Diamond mengatakan bahwa kualitas pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari kualitas pembangunan manusia dan pembangunan demokrasinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), kualitas pembangunan manusia di Indonesia di tahun 2020 ditandai oleh; (1) kualitas kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran per kapita mengalami penurunan; (2) terjadi pelambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disebabkan oleh Covid-19 yang hanya mencapai 71,94%; (3) perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yaitu dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah saja pada tahun 2020; (4) dari sisi pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan, yang rata-rata akses ke pendidikan menjadi lebih tinggi dan usia harapan hidup

¹⁰Baca Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Halaman 4.

¹¹Garry Marks dan Larry Diamond, L. (Eds.), *Re-examining Democracy: essays in honor of Seymour Martin Lipset*, Sage Publications, London, 1992



menjadi lebih meningkat.¹²

Terkait dengan indeks pembangunan demokrasi di Indonesia yang dilihat dari aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan aspek lembaga demokrasi, hanya kebebasan sipil yang mengalami penurunan dari 78,46 pada tahun 2018, menurun menjadi 77,20 pada tahun 2019. Penurunan yang sama terjadi pada kebebasan berkumpul dan berserikat, menurun dari 82,35 pada 2018 menjadi hanya 78,03 pada 2019. Kebebasan berpendapat juga mengalami penurunan dari 66,17 pada tahun 2018 menjadi hanya 64,29 pada tahun 2019.¹³ Penurunan pada aspek kebebasan sipil dan kebebasan berkumpul serta dalam aspek kebebasan menyampaikan pendapat menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih kita dalam pilkada belum disertai sepenuhnya oleh kebebasan sipil dan kebebasan menyampaikan pendapat yang masih direstriksi oleh pemerintah. Dengan kata lain *democratic development* kita masih bermasalah dan membutuhkan perbaikan dan pembenahan dalam banyak aspek. Namun kajian yang dilakukan oleh Ari Pradhanawati (2021) dalam buku; “Pilkada Orang Kuat” menunjukkan bahwa terdapat kemajuan yang luar biasa dalam “*developing democracy*” kita. Di antara berbagai perubahan tersebut antara lain adalah munculnya aktor-aktor politik lokal yang sangat pluralistik, tidak lagi didominasi oleh aktor negara seperti dari birokrat,

¹²Baca BPS 15 Desember 2020: “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 mencapai 71,94%”. Data lengkap bisa dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020*, BPS, Jakarta, 2021

¹³Baca kajian Maswadi Rauf (dkk) dalam: “Indeks Demokrasi Indonesia 2019” yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2019, halaman 21-25.

tetapi aktor-aktor non-negara mengambil peran yang sangat signifikan. Aktor-aktor non negara yang meramaikan politik lokal atau yang tampil dalam pilkada antara lain adalah kandidat yang berasal dari dunia bisnis, lembaga swadaya masyarakat dan bahkan menampilkan kandidat kepala daerah perempuan yang juga memiliki kisah sukses dalam memimpin dan membangun daerah. Para aktor ini, tidak hanya tampil terdepan dalam pembangunan ekonomi, tetapi mereka juga menjadi kunci sukses pembangunan demokrasi di daerahnya.¹⁴

Catatan penting lainnya adalah meskipun pilkada merupakan media penyampaian hak pilih setiap warga, akan tetapi peristiwa-peristiwa luar biasa terutama yang berdampak kepada kehidupan dapat memengaruhi partisipasi. Berdasarkan penjangjangan awal di 10 daerah pemilihan di Provinsi Jawa Tengah di triwulan terakhir 2021 atau hampir dua tahun pandemi Covid-19 berlangsung, maka terlihat penurunan antusias warga (di mana di dalamnya juga terdapat responden muda dan mahasiswa) guna berpartisipasi, meskipun hanya untuk membicarakan perihal pemilihan. Penyampaian hak pilih tidak lagi menjadi prioritas dibandingkan dengan upaya untuk bertahan hidup. Jika situasi luar biasa seperti itu ditarik ke depan dalam perspektif pilkada yang akan datang, maka gambaran berdasarkan situasi-situasi normal yang diperoleh pada pilkada-pilkada sebelumnya di era demokrasi dengan tingkat partisipasi yang

¹⁴Baca buku; "Pilkada Orang Kuat-Kajian Mahasiswa Doktor Ilmu Sosial FISIP UNDIP 2020", halaman 241.



bahkan lebih kurang dari masa Orde Baru bisa semakin tidak atraktif guna diikuti.¹⁵

Penelitian ini melihat partisipasi mahasiswa dalam pilkada sebagai bentuk pembangunan demokrasi atau *democratic development*. Partisipasi politik mahasiswa dalam pilkada dilihat dari berbagai variabel antara lain; (1) kesadaran atau kesukarelaan politik mahasiswa; (3) akses mahasiswa terhadap informasi; (4) akses mahasiswa terhadap media informasi; (5) media informasi yang digunakan oleh mahasiswa sebagai bentuk partisipasi politik di ruang publik dan; (6) pandangan mahasiswa terhadap penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanatif, yang mana data penelitian diperoleh dengan teknik survei. Survei dilakukan terhadap 331 responden dan mayoritas responden adalah mahasiswa yang sedang studi di beberapa perguruan tinggi baik di luar Jawa maupun di Jawa (Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera). Survei dilakukan menggunakan *google form* yang disebar dengan cara *snowball* dan pertanyaan survei digelindingkan dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain melalui *link* yang kami sebar. Analisis data dilakukan dengan teknik interpretatif berdasarkan hasil survei yang sudah diolah. Di samping dianalisis dengan teknik interpretatif, data juga dianalisis dengan teknik longitudinal yaitu teknik analisis data yang melihat struktur data berdasarkan tren

¹⁵Lihat. Pradhanawati, Ari et al. Perilaku Sosial Masyarakat dan Dinamika Politik di Tengah Pandemi COvid-19 di Jawa Tengah, JalanMata, 2021.

atau kecendrungan yang terjadi.¹⁶

¹⁶Bagian ini bisa baca: "<https://www.surveymonkey.com/mp/menganalis-data-survei/>





PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PILKADA SERENTAK 2020

Demografi Peserta Pilkada di Indonesia

a. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan (59,75%) dan laki-laki hanya 40,25%.

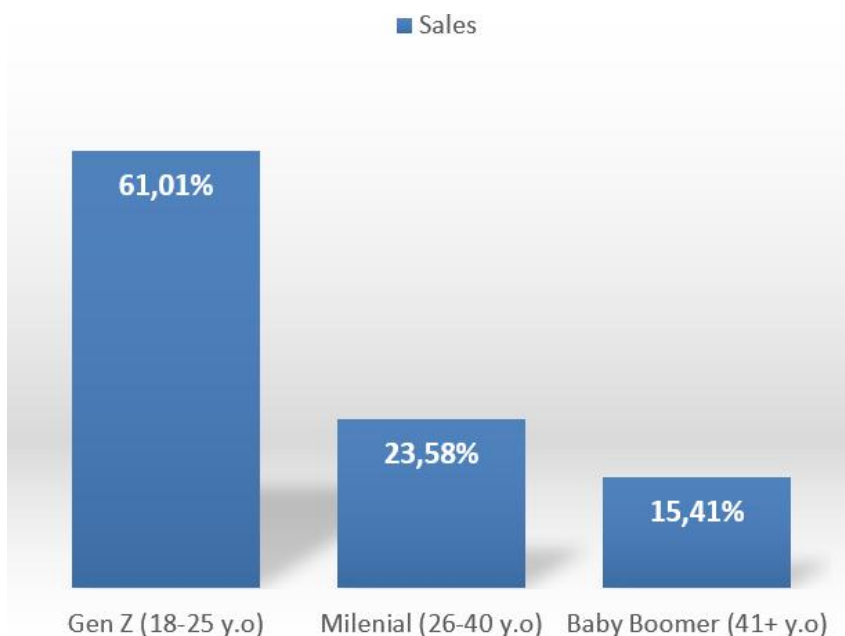
Grafik 1. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Demografi Responden Berdasarkan Umur

Dilihat dari demografi responden berdasarkan umur, responden Gen Z (18-25 tahun) sebanyak 61,01% dan milenial (26-40 tahun) mencapai 23,58%.

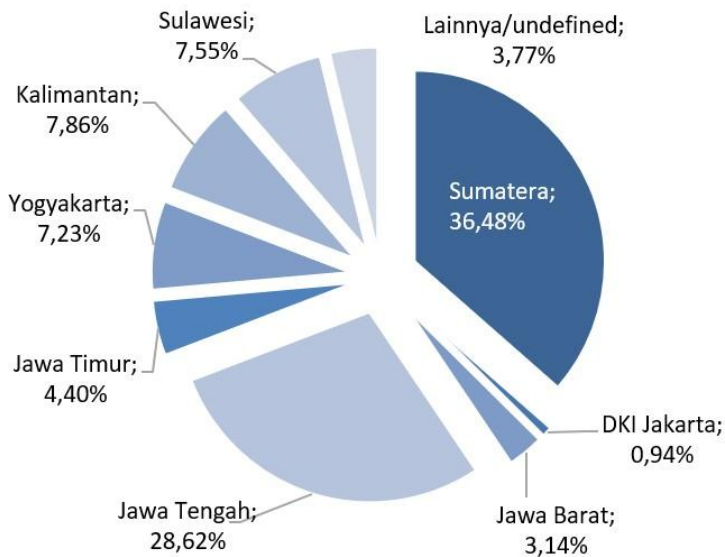
Grafik 2. Demografi Responden Berdasarkan Umur



c. Demografi Responden Berdasarkan Lokasi Kampus

Berdasarkan demografi tempat studi, mayoritas responden dalam penelitian ini sedang studi di wilayah Sumatera mencapai 36,48%, Jawa Tengah sebanyak 28,62%, dan Kalimantan sebanyak 7,86%.

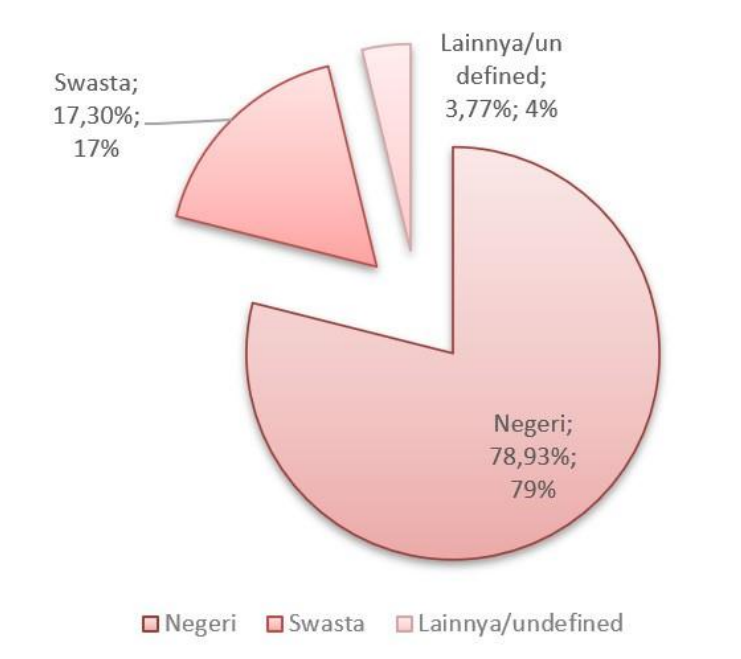
Grafik 3. Responden Berdasarkan Lokasi Kampus



d. Demografi Responden Berdasarkan Status Kampus

Jika dilihat dari kampus negeri dan swasta, responden kebanyakan berasal dari kampus negeri sebanyak 78,91% dan dari kampus swasta hanya 17,30%.

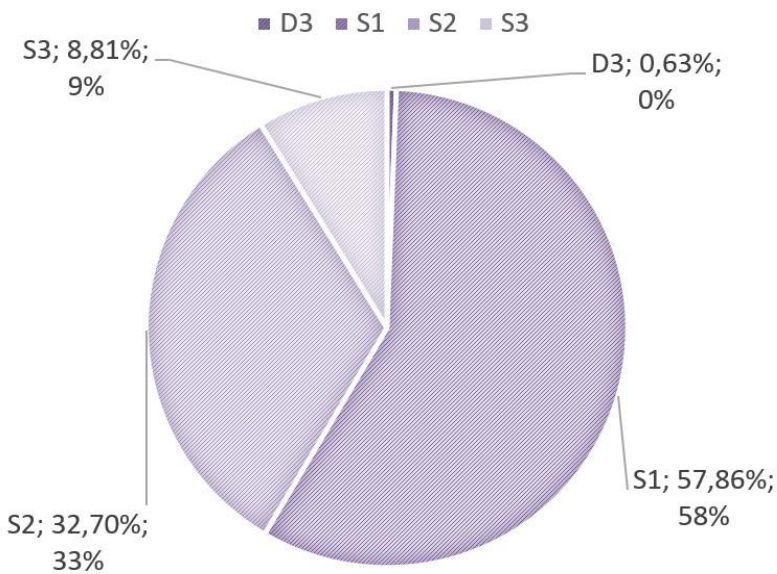
Grafik 4. Responden Berdasarkan Status Kampus



e. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Sedang Ditempuh

Berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, responden yang sedang studi S1 sekitar 57,86% dan yang S2 sekitar 32,70%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas sedang menempuh kuliah S1 di perguruan tinggi.

Grafik 5. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan



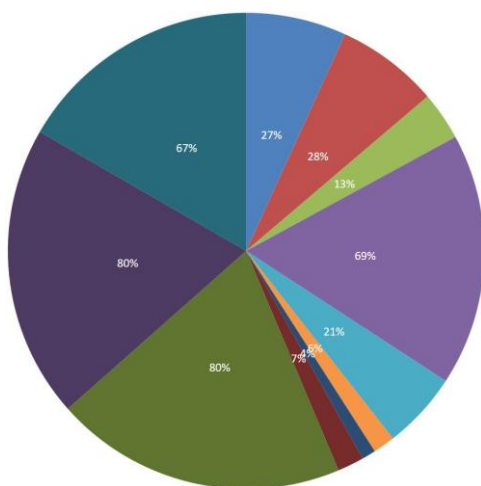
Karakteristik Mahasiswa Terkait dengan Pilkada

a. Karakteristik Sosial Responden

Mayoritas responden tidak aktif berorganisasi, baik intra ataupun ekstra kampus, hanya ada kisaran 27%-28% yang terlibat. Mayoritas responden tidak punya hubungan keluarga dengan calon kepala daerah ataupun dengan anggota partai politik, hanya 13% yang punya hubungan tersebut. Mayoritas responden punya keluarga sebagai pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri sebesar 69%. Mayoritas responden tidak memiliki anggota keluarga sebagai penyelenggara pemilu (72%). Mayoritas responden tidak sebagai panitia ad hoc pilkada (92%), dan tidak pula menjadi anggota tim sukses calon (94%). Sebagai pemilih, mayoritas responden terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) (80%), menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 (80%), dan menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2020 (67%).



Grafik 6. Responden Berdasarkan Karakteristik Sosial
(keterlibatan dalam organisasi)



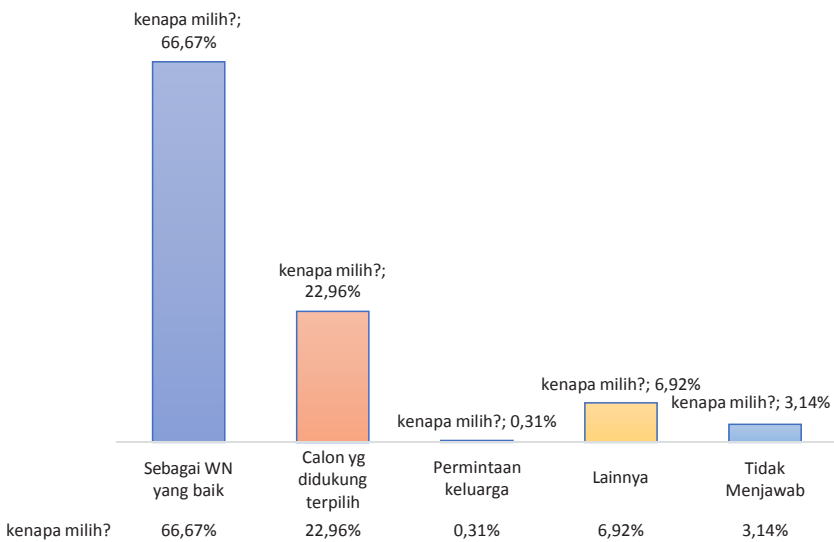
- Anggota organisasi ekstra kampus?
- Anggota organisasi intra kampus?
- Punya keluarga calon/anggota partai?
- Punya keluarga PNS/TNI/Polri?
- Punya keluarga penyelenggara pemilu?
- Di pilkada 2020 jadi panitia ad hoc Pilkada?
- Di pilkada 2020 jadi timses salah satu calon?
- Di pilkada 2020 jadi relawan/pemantau?
- Terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada 2020?
- Pada pemilu 2019 menggunakan hak pilih?
- Pada pilkada 2020 menggunakan hak pilih?

Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada

a. Kesadaran Memilih

Mayoritas responden menggunakan hak memilih dalam pilkada dengan alasan sebagai warga negara yang baik (66,67%) dan untuk mendukung keterpilihan calon yang didukung (22,96%).

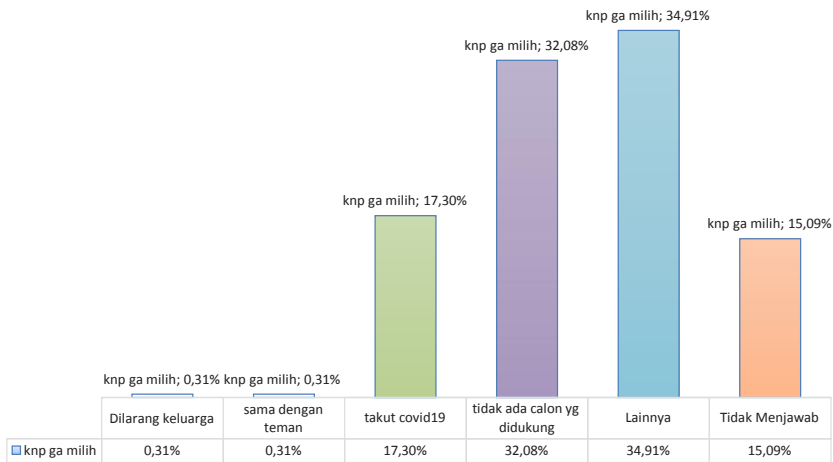
Grafik 7. Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada Berdasarkan Kesadaran Memilih



b. Responden Bersikap Apatis

Sebanyak 32,08% responden mengatakan bahwa mereka tidak memilih dalam pilkada jika tidak ada calon yang mereka dukung. Sedangkan 17,30% responden tidak memilih karena takut tertular Covid-19.

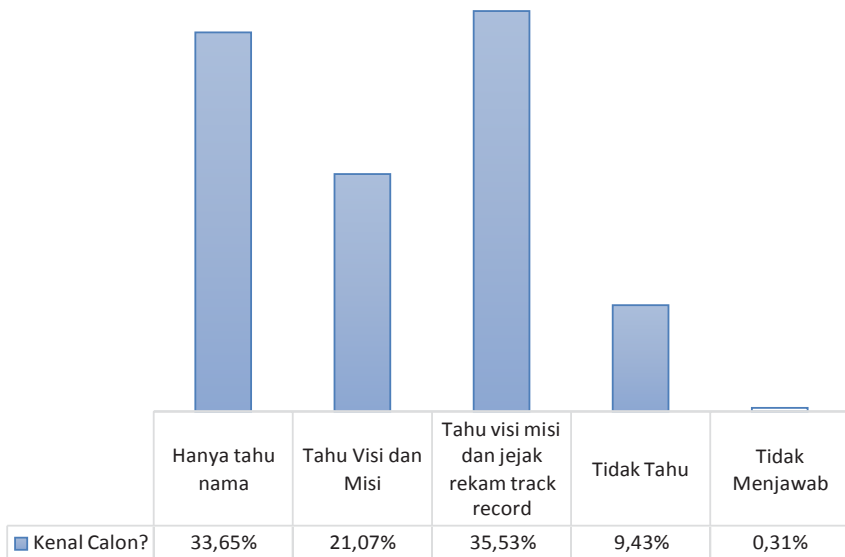
Grafik 8. Responden Berdasarkan Sikap Apatis



Pengetahuan tentang Calon

Responden cukup aktif dalam mencari tahu informasi tentang calon. Sebanyak 35,53% responden tahu visi misi sampai rekam jejak calon tersebut. Sedangkan 33,65% hanya mengetahui nama calon.

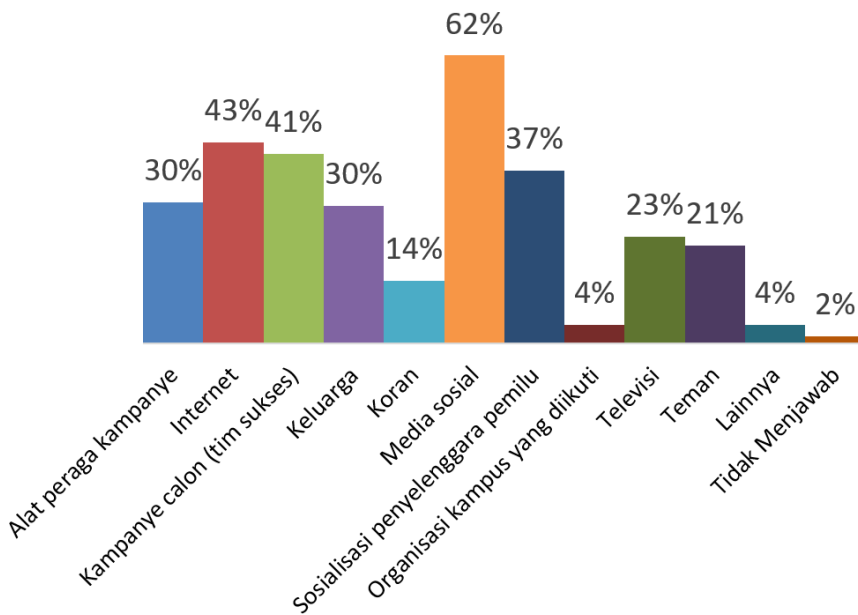
Grafik 9. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Pengetahuan tentang Calon



Sumber Informasi Pilkada

Responden memperoleh informasi lebih banyak tentang pilkada dari media sosial. Sekitar 62% responden menjawab bahwa informasi tentang pilkada mudah didapatkan lewat media sosial.

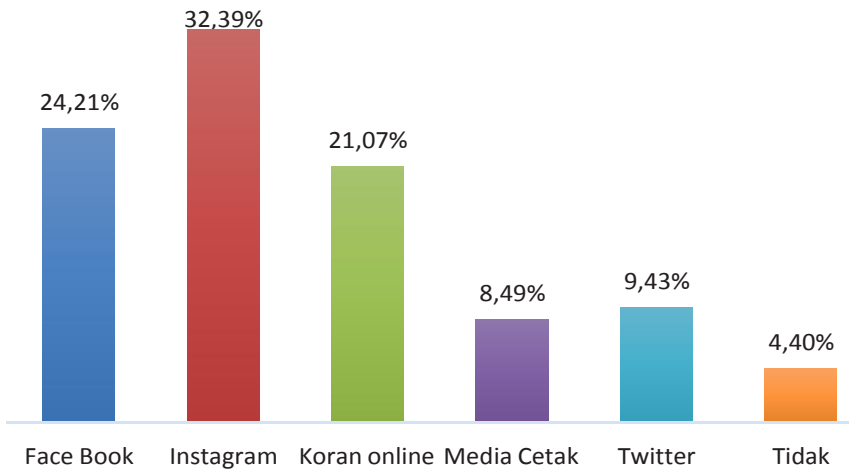
Grafik 10. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Sumber Informasi Pilkada



Media Pemberi Informasi Pilkada 2020

Responden memperoleh informasi terkait Pilkada 2020 paling banyak melalui media sosial seperti Instagram 32,39%, facebook 24,21% dan media *online* 21,07%.

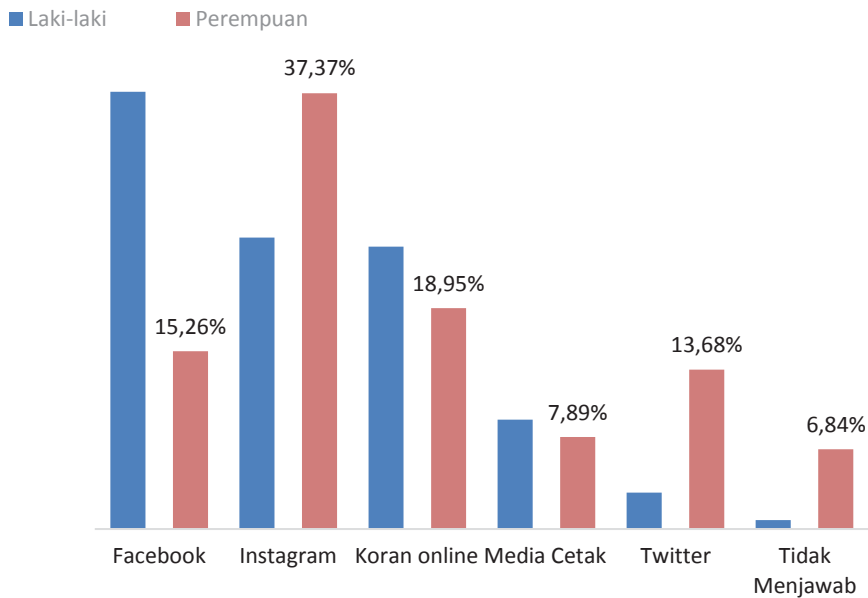
Grafik 11. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Media Pemberi Informasi Pilkada 2020



a. Akses Informasi ke Media Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan akses ke media, laki-laki lebih banyak memperoleh informasi terkait pilkada melalui Facebook sebanyak 37,50% dan perempuan lebih banyak melalui instagram 37,37%.

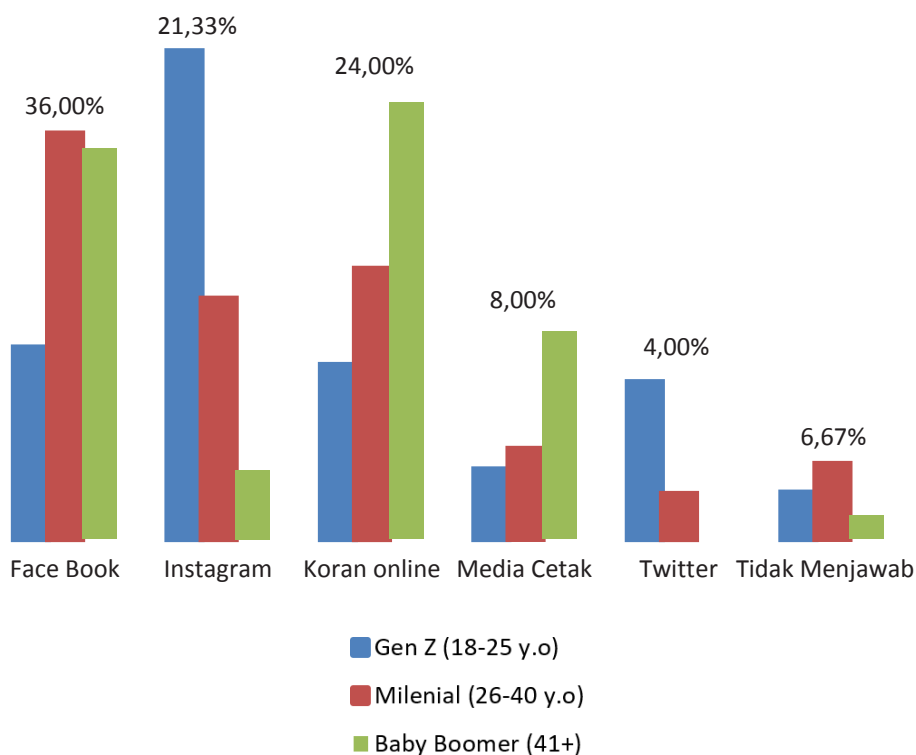
Grafik 12. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Akses Informasi Ke Media Sesuai Dengan Jenis Kelamin



b. Media Akses Informasi Pilkada 2020 Berdasarkan Usia

Berdasarkan akses ke media informasi pilkada, responden yang berusia milenial (26-40 tahun), menggunakan Facebook sebagai ruang untuk memperoleh informasi Pilkada dan responden generasi Z lebih banyak menggunakan instagram sebagai media untuk memperoleh informasi pilkada.

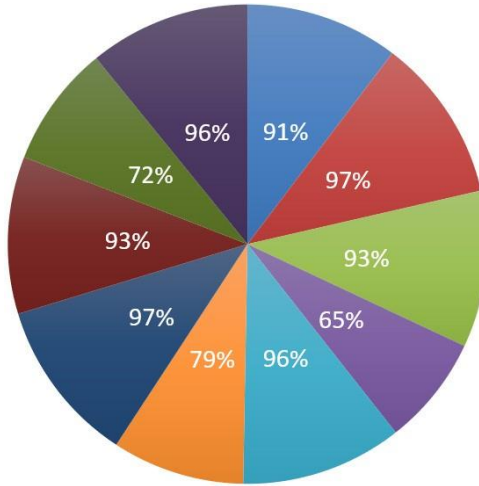
Grafik 13. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Media Akses Informasi Pilkada 2020 Sesuai Usia



Pendapat Mahasiswa Terkait dengan Pilkada 2020

Sekitar 91% responden memiliki pengetahuan dan sikap terhadap pilkada, mengetahui pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat sebanyak 97%, mengetahui pilkada tetap dilaksanakan meski ada badai Covid-19 sebanyak 93%, memiliki keyakinan bahwa pemerintah dapat mengatasi Covid-19 sebanyak 65%, tahu bahwa di tempat pemungutan suara pemerintah menerapkan protokol kesehatan, tahu pilkada sebagai hak warga negara untuk memilih pemimpin sebanyak 97%, mengetahui bahwa pilkada sebagai kesempatan untuk memilih kepala daerah yang lebih baik, mengetahui pilkada sebagai kesempatan untuk mengganti kepala daerah yang buruk dan responden memiliki keyakinan bahwa suara mereka dalam pilkada sangat berguna untuk menentukan kemajuan daerah ke depan mencapai 96% responden.

Grafik 14. Partisipasi Mahasiswa Berdasarkan Pengetahuan dan Sikap Mereka



- 1 Pengetahuan dan sikap terhadap Pilkada 2020

- 2 Tahu pilkada bentuk kedaulatan rakyat

- 3 Tahu pilkada tetap dilaksanakan tahun 2020 untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan daerah

- 4 Yakin pemerintah mampu menangani penyebaran Covid-19 saat hari pemungutan suara

- 5 Sebelum hari pemungutan suara sudah tahu Pilkada 2020 di TPS akan diterapkan protokol kesehatan

- 6 Sebelum hari pemungutan suara sudah yakin KPU mampu menerapkan protokol kesehatan di TPS

- 7 Tahu pilkada adalah hak memilih pemimpin

- 8 Tahu pilkada kesempatan memilih kepala daerah yang baik

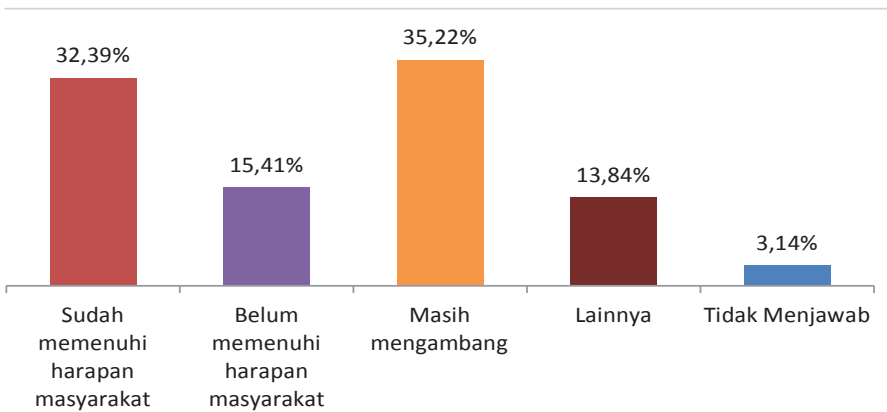
- 9 Tahu pilkada adalah kesempatan mengganti kepala daerah yang buruk

- 10 Yakin suara saya penting untuk kemajuan daerah ke depan



- a. Pendapat Responden tentang Visi Misi Calon Kepala Daerah
- Responden berpendapat bahwa visi dan misi para kandidat yang berkontestasi dalam pilkada masih mengambang mencapai 35,22% dan sekitar 32,39% responden yang menjawab bahwa visi dan misi para calon sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

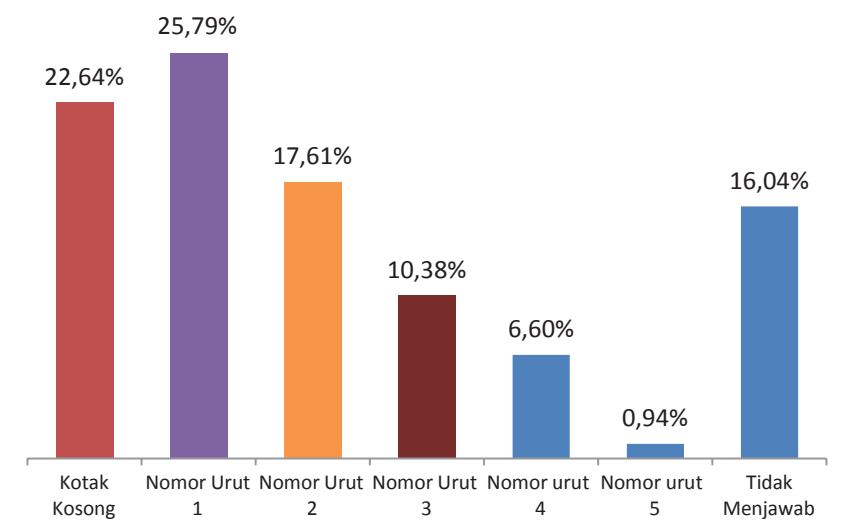
Grafik 15. Pendapat Responden tentang Visi Misi Calon Kepala Daerah



b. Pengetahuan Responden tentang Kontestan Pilkada

Hampir sebagian besar responden sudah mengetahui nomor urut masing-masing calon kepala daerah dalam pilkada. Sekitar 25,79% responden memilih nomor urut 1 dan 22,64% responden memilih kotak kosong.

Grafik 16. Pengetahuan Responden tentang Nomor Urut Kontestan Dalam Pilkada

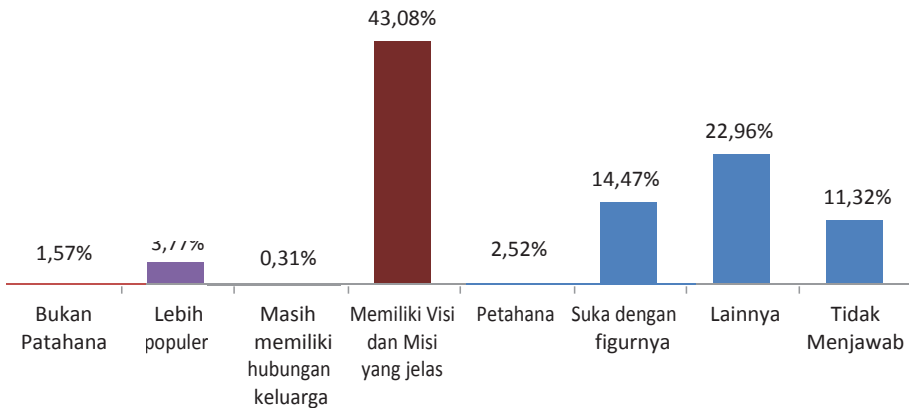


Alasan Berpartisipasi dalam Pilkada

a. Dalam Pilkada dan Tidak Memilih Dalam Pilkada

Sebanyak 43,08% responden menjawab bahwa mereka memilih dalam pilkada karena mengetahui dan tertarik dengan visi misi calon kepala daerah. Ada sekitar 14,47% responden yang memilih karena mereka suka dengan figuranya.

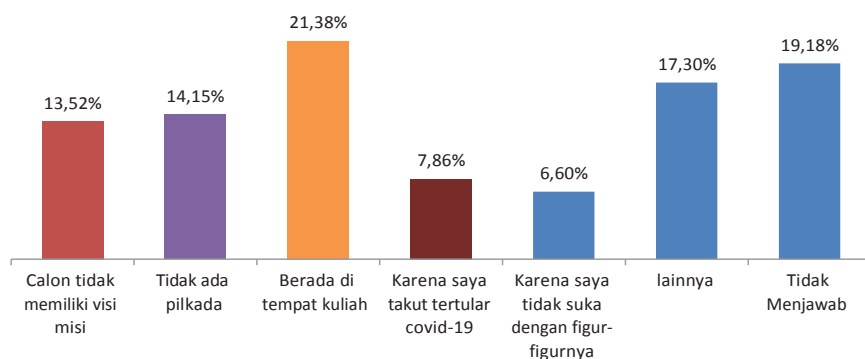
Grafik 17. Alasan Responden Memilih Figur Tertentu dalam Pilkada



b. Alasan Tidak Memilih dalam Pilkada

Sebanyak 21,38% responden mengatakan bahwa mereka terpaksa tidak memilih dalam pilkada karena berada di daerah/lokasi tempat kuliah dan tidak pulang kampung, sedangkan 19,18% tidak memiliki alasan yang jelas atau tidak menjawab.

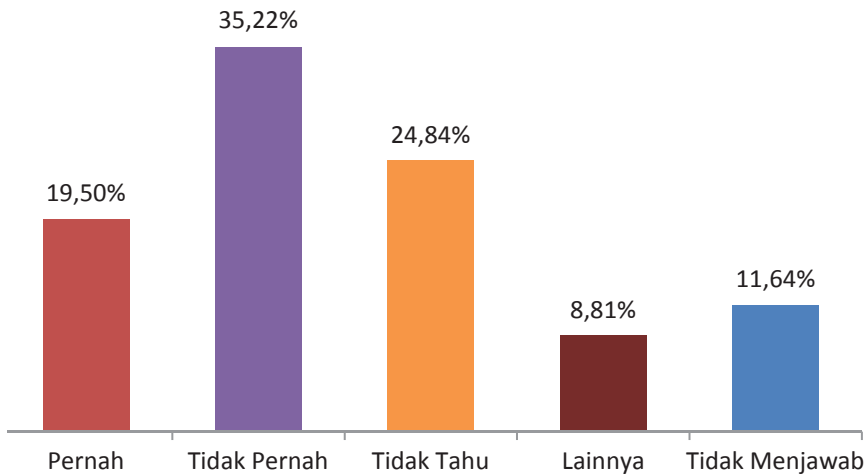
Grafik 18. Alasan Responden Tidak Memilih dalam Pilkada



Peran KPU dan Bawaslu dalam Pilkada

Sebanyak 35,22% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah diajak untuk berpartisipasi dalam pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Hanya 19,50% responden yang mengatakan bahwa mereka pernah diajak berpartisipasi oleh KPU dan Bawaslu.

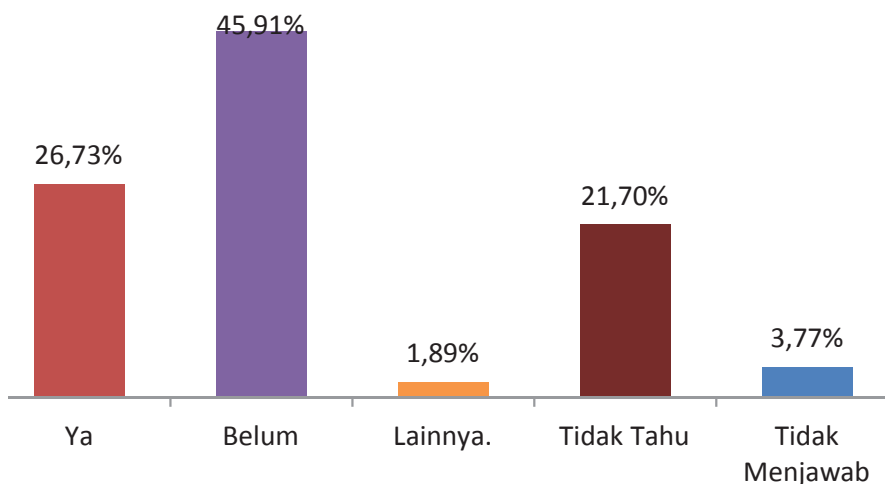
Grafik 19. Pendapat Responden Terkait dengan Peran KPU dan Bawaslu dalam pilkada, khususnya dalam Ajakan Berpartisipasi dalam Pilkada



a. Sosialisasi Pilkada oleh KPU

Sebagian besar responden menjawab bahwa KPU belum maksimal dalam melakukan sosialisasi pilkada. Ada sekitar 45,91% responden yang menjawab belum dan 26,73% yang mengatakan sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi pilkada.

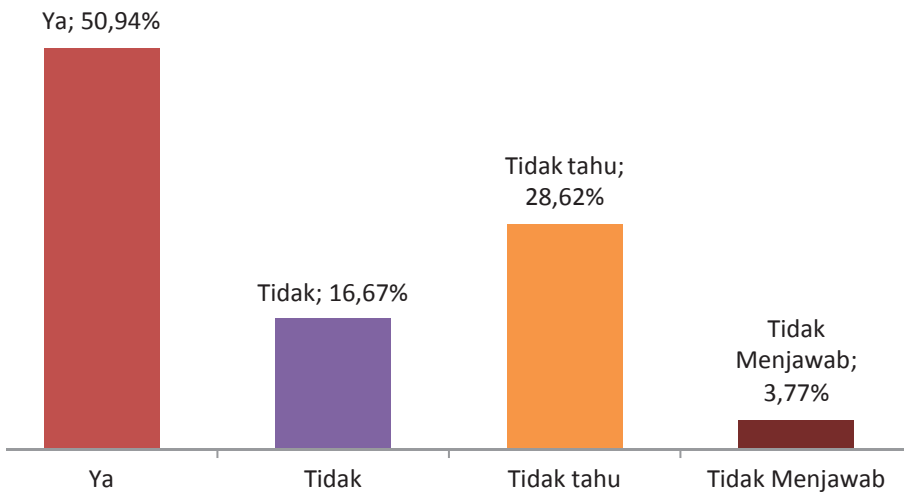
Grafik 20. Pendapat Responden Terkait dengan Sosialisasi Pilkada oleh KPU



b. Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu

Sebagian besar responden atau sebanyak 50,94% mengatakan bahwa fungsi pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu sudah berjalan dan hanya 16,67% yang mengatakan tidak berjalan.

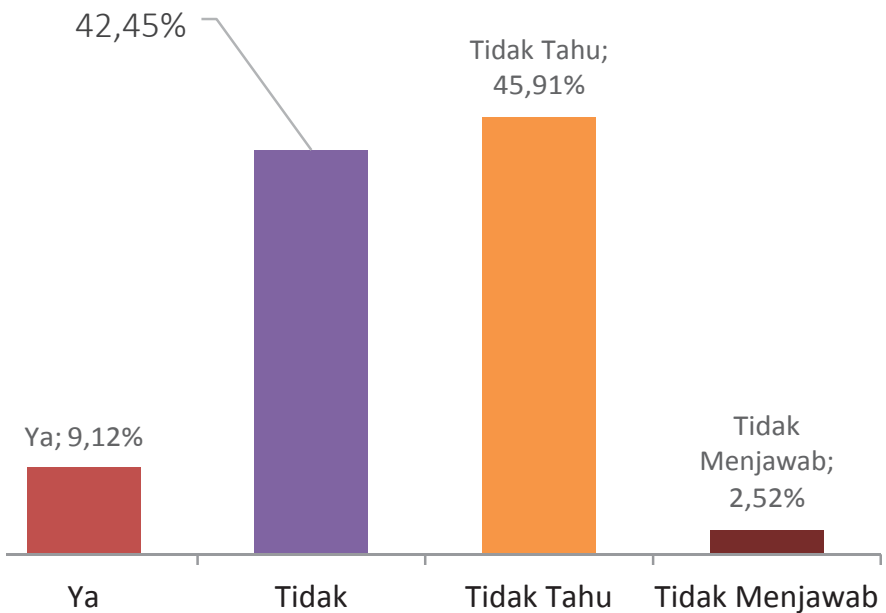
Grafik 21. Pendapat Responden Terkait dengan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu



Politik Uang dan Kecurangan dalam Pilkada

Umumnya responden menjawab tidak tahu terkait dengan politik uang dan kecurangan dalam pilkada, yang jumlahnya mencapai 45,91% dan 42,45% responden mengatakan tidak menerima uang dan tidak terlibat dalam kecurangan pilkada.

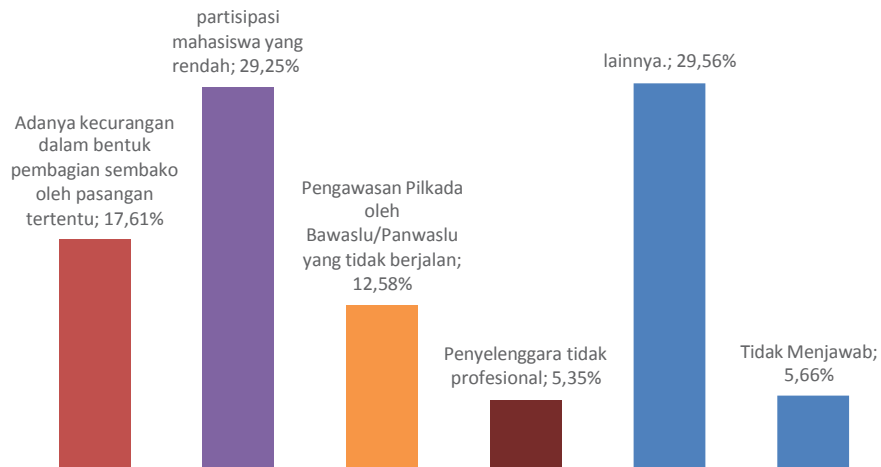
Grafik 22. Pendapat Responden tentang Politik Uang dan Kecurangan dalam Pilkada



Masalah Utama dalam Pilkada

Masalah utama dalam pilkada menurut responden adalah (1) partisipasi mahasiswa yang rendah (25,29%); (2) adanya kecurangan dalam bentuk pembagian sembako oleh pasangan tertentu; 17,61%); (3) pengawasan pilkada oleh Bawaslu yang tidak berjalan (12,58%); dan (4) Penyelenggara pilkada yang tidak profesional (5,35%).

Grafik 23. Masalah Utama dalam Pilkada Menurut Responden





KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) partisipasi mahasiswa dalam pilkada didorong oleh kesadaran sebagai warga negara yang baik; (2) mahasiswa tidak akan memilih dalam pilkada jika tidak ada figur yang mereka sukai; (3) mahasiswa cukup aktif dalam mencari tahu informasi terkait dengan calon kepala daerah; (4) kebanyakan mahasiswa memperoleh informasi tentang pilkada dari media sosial facebook, instagram dan twitter; (5) media sosial yang paling banyak digunakan mahasiswa adalah instagram dan facebook; (6) mahasiswa laki-laki memperoleh lebih banyak informasi pilkada melalui Facebook dan mahasiswa perempuan lebih banyak memperoleh informasi melalui instagram; (7) mahasiswa milenial lebih banyak menggunakan instagram dan mahasiswa gen Z lebih banyak memperoleh informasi dari facebook; (8) mayoritas mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan melihat pilkada sebagai kesempatan untuk mengganti pemimpin yang mereka



tidak suka; (9) mahasiswa menilai bahwa visi dan misi kontestan kepala daerah masih sangat mengambang; (10) mahasiswa mengetahui nomor urut pasangan calon kepala daerah dalam pilkada; (11) mahasiswa memiliki alasan yang rasional memilih dalam pilkada karena tertarik dengan visi dan misi calon kepala daerah; (12) mahasiswa tidak memilih dalam pilkada karena mereka berada di lokasi studi yang jauh dari tempat penyelenggaraan pilkada; (13) mahasiswa merasa bahwa mereka tidak pernah diajak berpartisipasi dalam pemilu oleh KPU; (14) mahasiswa menilai bahwa KPU belum maksimal dalam melakukan sosialisasi pilkada; (15) mahasiswa tidak tahu adanya politik uang dalam pilkada; (16) masalah utama dalam pilkada menurut mahasiswa adalah partisipasi mereka yang rendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2020). *Mengapa Negara Gagal*. Jakarta: Eleks Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Emerson, D. K. (2021). *Indonesia Beyond Soeharto-Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriyah. (2012). *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Fitriyah, Alfirdaus, L.K, & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1), 1-10. doi: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10
- Fung, A. & Wright, E.O. (2001). *Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance*. *Politics &*



Society, 29(1), 5–41. doi:10.1177/0032329201029001002

Fung, A. & Wright, E.O. (2003). *Deepening Democracy*. UK: Verso.

Huntington, S. P. & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Marks, G. & Diamond, L. (Ed). (1992). *Re-examining Democracy: essays in honor of Seymour Martin Lipset*. London: Sage Publications

Pradhanawati, Ari. (2021). *Pilkada Orang Kuat*. Yogyakarta: IPD Press.

Pradhanawati, Ari, Mustofa Agung Sardjono, Fitriyah, Reni S. Dewi, Frieda NRH, Herbasuki, Greg. Sahdan, Martin Hanura, Dina Lestari P, Alan Prahutama, Wahid Abdulrahman. (2021). *Perilaku Sosial Masyarakat dan Dinamika Politik di Tengah Pandemi COvid-19 di Jawa Tengah, JalanMata*.

Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (ed). 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: IPD Press.

Sahdan, Gregorius dan Besar Tirta Husodo. 2021. *Transformasi Orang Kuat Dalam Pilkada dalam buku Pilkada Orang Kuat*. Yogyakarta: IPD Press.



GLOSSARIUM

- Deepending Democracy : Sebuah fase di mana demokrasi menjadi sebuah budaya politik
- Developing Democracy : Menuju perubahan yang relatif lebih baik daripada yang sebelumnya ada, yang mana semua warga negara memiliki hak dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara
- Golput : Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan
- Indeks Pembangunan Manusia : Indikator komposit untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup



- Indeks Pembangunan Demokrasi : Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi
- Kotak kosong : Pilkada yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal yang tidak memiliki saingan sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kotak kosong
- Kuantitatif eksplanatif : Jenis penelitian yang tidak menitikberatkan pada kedalaman data melainkan merekam sebanyaknya data dari populasi yang besar
- Milenial : Generasi Y, generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 1995 pada saat teknologi telah maju
- Partisipasi Pemilih : Pemilih yang hadir untuk memberikan suara pada hari pemilihan
- Snowball Sampling : Teknik pengambilan sampel, yang mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian

- Gen Z : Generasi internet atau generasi net, generasi yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010
- Government Party : Partai politik yang mendukung pemerintah yang sedang berkuasa
- Rezim Otoritarian : suatu pemerintahan yang kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin
- Survei : Penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner), kemudian semua jawaban yang diperoleh dicatat, diolah, dan dianalisis.
- Teknik Longitudinal : Analisis data yang melihat struktur data berdasarkan tren atau kecenderungan yang terjadi
- Teknik Interpretatif : Upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti





DAFTAR SINGKATAN

- Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu
BPS : Badan Pusat Statistik
Golkar : Golongan Karya
Golput : Golongan Putih
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
KPU : Komisi Pemilihan Umum
Pemilu : Pemilihan Umum
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah



tentang PENULIS

Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, M.S.



Lahir di Semarang, 1 Mei 1961. Meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (1985). Meraih gelar Magister Agribisnis (1990) dan Doktor Ilmu Sosial (1996) Program Pascasarjana pada Universitas Padjajaran.

Pascasarjana pada Universitas Padjajaran.

Guru Besar dalam bidang Sosiologi Industri pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, NIP 196105011987102001 dan Pembina Utama Madya, Golongan IV/d ini, aktif mengajar sejak 1987 di S1 dan beberapa Program S2 sejak 2000 dan Program S3 sejak 2003 di lingkungan Universitas Diponegoro. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Program S3 Doktor Ilmu Sosial Fisip-Undip (2013 - 2017).

Telah menulis banyak artikel di beberapa jurnal nasional dan internasional serta beberapa media koran. Menulis 15 buku, di antaranya tentang Pendidikan Politik, Demokrasi,



Pemilu. Pilkada, Ekonomi Politik, Riset Operasional, Peran Buruh Perempuan, Gerakan Sosial Buruh Industri, Paradigma Baru Sistem Pendidikan. Memeroleh 4 HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) 2019-2021.

Menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden RI (2019) dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI (2012). Dosen Berprestasi I FISIP- UNDIP (2009).

Pada Pemilu 1999 pernah menjadi Anggota PPD I Jawa Tengah, Assesors BAN PT 2000-2001. *Evaluator Arizona State University Indonesian Institutions change Program on Conflict Resolution* (2004-2006). Anggota Deputat Keesaan Sinode XXIII Gereja-Gereja Kristen Jawa (2004-2006).. Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa Tengah (2003-2008). Dua periode menjadi Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah (2007- 2019). Dua periode menjadi Pengurus Pusat HIPIIS (Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) sejak 2014 sampai sekarang. Menjadi Anggota Dewan Profesor UNDIP (2020-2025).

Dr. Sos. Fitriyah., Dra., M.Si.



Lahir di Kendal 1962, merupakan dosen di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro sejak 1986. Menempuh Pendidikan tinggi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (1984), S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (1999), dan S3 Ilmu Sosial Universitas Diponegoro (2018).

Sebagai akademisi sekaligus praktisi Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah pada periode 2003-2008. Minatnya pada Pemilu tidak hanya dipupuk melalui mata kuliah yang diampu, riset yang dilakukan, tetapi juga dengan terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu (2003-2008), beberapa kali menjadi tim seleksi KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagai Panelis Debat Calon di sejumlah Pilkada di Jawa Tengah, sebagai legal drafter Penyusunan Buku Undang-Undang Pemilu pada Partnership Governance Reform in Indonesia (2015), sebagai fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh PUSKAPOL- Universitas Indonesia (2014, 2016), sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kode Etik Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah (2021-2022), dan menjadi *section* editor pada Jurnal Electoral Governance Jurnal (Tata Kelola Pemilu



Indonesia). Pengetahuan pemilunya juga didapat melalui pengalamannya mengikuti Training course in Seminar on Local Election Management And Formal Education for Election at JICA Osaka International Center di Jepang (2005). Karya yang diterbitkan selain artikel jurnal dan kontributor buku adalah buku dengan judul Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia (2012).

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A,



Lahir di Munta, Desa Bangka Ara, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT 11 Agustus 1973. Beliau kerap dipanggil Goris, menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2001 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat

Desa "APMD" dan S2 di Program Studi Ilmu Politik UGM tahun 2010. Saat ini Goris sedang menempuh Pendidikan S3 di Program Studi Ilmu Sosial FISIP UNDIP. Goris sehari-hari berkerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD". Pada tahun 2006, Goris dengan dukungan Konrad Adenauer Stiftung Jerman (KAS) mendirikan The Indonesian Power for Democracy (IPD) yang fokus pada masalah pemilu, tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Goris sering menulis di media nasional antara lain: Kompas, Media Indonesia dan Suara Pembaruan. Goris juga aktif menulis di Jurnal CSIS Jakarta untuk masalah politik, demokrasi dan pemerintahan. Pada tahun 2018, Goris merintis kerjasama dengan Badan Pengkajian MPR yang kemudian menghasilkan sebuah buku berjudul: "Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas" yang diterbitkan oleh IPD bekerjasama dengan Badan Pengkajian MPR. Sampai dengan saat ini melalui IPD, Goris telah menulis di berbagai buku yang diterbitkan IPD antara lain; Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia



(IPD Press, 2009), Pilkada dan Kemiskinan di NTT (IPD Press, 2008), Negara dalam Pilkada (IPD Press, 2009), Desa Kuat Negara Berdaulat (IPD, 2019), Oligarki dan Klientelisme Dalam Pilkada (IPD, 2020), Pilkada Orang Kuat (IPD, 2021) dan juga beberapa buku yang diterbitkan oleh APMD. Skripsi Goris di S1 Ilmu Pemerintahan diterbitkan menjadi buku dengan judul: Transisi Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (Pondok Edukasi, 2004). Tahun 2011-2014, Goris bekerja menjadi Tenaga Ahli di Komisi II DPR RI. Goris ahli dalam bidang politik, demokrasi (pemilu dan pilkada) dan governance.

Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono, IPU

Lahir di Semarang 1959, merupakan salah satu Guru Besar di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang pencapaiannya termasuk cepat (2000), dan secara kepangkatanpun telah mencapai pada jenjang tertinggi Pembina Utama (IVE; 2013). Pendidikan tinggi dimulai di Universitas Mulawarman untuk Sarjana Muda (lulus 1981), Sarjana/S1 (1982), dan selanjutnya meloncat ke jenjang Doktor (S3; 1990, ijazah 1991) di Universitas Hamburg (Jerman). Melihat perspektif kebutuhan pengembangan institusi ke depan, mengambil dan menyelesaikan Program Profesi Keteknikan Hayati di IPB University (2020). Aktif di berbagai aktivitas ilmiah dan kemasyarakatan, baik di dalam dan di luar Universitas Mulawarman (Unmul).



Saat ini merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul, yang didudukinya selama dua periode (2014/2018 dan 2018/2022). Di samping itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga tetap dijalankannya di antaranya, selama sepuluh tahun (1991-2001) pernah mendampingi sebagai tenaga ahli sosial pada salah satu perusahaan perikanan di Kalimantan Timur. Sejak 2011 merupakan salah satu koordinator pada kepengurusan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) dan juga anggota Dewan Pembina Yayasan NTFP-EP Indonesia serta Yayasan Sahabat Pohon Indonesia (YSPI) yang berkedudukan di Bogor. Memiliki



jaringan keahlian yang cukup luas pada bidang Perhutanan Sosial, Sosiologi Kehutanan, dan Politik Kehutanan, telah membawanya mengunjungi lebih dari 20 negara untuk berbagai aktivitas akademik, dari seminar/konferensi, pelatihan, hingga menjadi peneliti, penguji disertasi dan pengajar/guru besar tamu. Karyanya dalam bentuk artikel ilmiah cukup banyak tersebar pada berbagai urnal nasional dan juga Jurnal internasional, tetapi satu bukunya yang dapat dikatakan sebagai warna sosial awal dalam keilmuan kehutanan di Indonesia yang di masa lalu lebih berfokus pada aspek teknis-biologis adalah "Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya". Buku yang terbit tahun 2004 tersebut ditulis disaat menjadi akademisi tamu di Melbourne University, Australia (2001/2002). Kerjasama dengan dosen/peneliti dari universitas atau lembaga penelitian lainnya di dalam dan luar negeri telah dirintis paling tidak sejak dua dasawarsa yang lalu antara lain dalam penulisan bahan ajar dan buku. Dalam dua tahun terakhir ini (2021 dan 2022) ini juga mendapat undangan untuk menjadi salah satu *junction lecturers* (bersama para professor dari berbagai perguruan tinggi di Asia) di Waseda University (Jepang). Kerjasama dengan peneliti dari bidang yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan pada laporan hasil penelitian ini bersama dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip Undip), menambah pengalaman baru dalam memecahkan kompleksitas problema pembangunan di berbagai bidang, tidak terkecuali pada isu sosial-politik, yang membutuhkan pendekatan multi-/interdisiplin.